



Manajemen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Melalui Pemberdayaan Usaha Lokal Masyarakat: *a Review*

Pijar Hatinurani Merdeka¹

¹Universitas Padjadjaran, Indonesia

ABSTRAK

Indonesia adalah negara maritim yang mempunyai luas laut sekitar 70% dari total luas wilayah Indonesia. Potensi sumberdaya alam yang melimpah semakin menambah keyakinan bahwa negara ini adalah negara maritim. Di balik nama besar itu, masih banyak penduduk yang tidak atau bahkan belum merasakan udara pembangunan yang telah lama digalakkan di negara ini. Masyarakat pesisirnya kebanyakan masih hidup dalam kemiskinan. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat pesisir, salah satunya melalui hukum atau kebijakan pemerintah yang mempertimbangkan budaya dan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Selama tiga dasawarsa terakhir pembangunan kelautan dan perikanan selalu diposisikan sebagai sektor yang dipinggirkan (peripheral sector) dalam pembangunan ekonomi nasional. Penemuan data dilakukan melalui tinjauan literatur yang ada, terutama makalah peer-review, artikel dan laporan penelitian, tetapi juga dari laporan dan penilaian pemerintah dan literatur lain tentang masyarakat pesisir di Indonesia. Data ini digunakan untuk menganalisis solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang efektif. Program pemberdayaan masyarakat pesisir bisa dilakukan dengan berbagai cara tergantung daripada aspek yang akan ditingkatkan. Namun dari beberapa program yang dilaksanakan salah satunya berfokus pada peningkatan mindset dalam melihat potensi sumberdaya, salah satunya adalah kegiatan seminar dalam pengolahan sumberdaya.

ABSTRACT

Indonesia is a maritime country which has a sea area of around 70% of the total area of Indonesia. The abundant potential of natural resources adds to the belief that this country is a maritime country. Behind that big name, there are still many residents who don't or haven't even felt the air of development that has long been encouraged in this country. Most of the coastal communities still live in poverty. Therefore efforts are needed to increase the empowerment of coastal communities, one of which is through laws or government policies that take into account the culture and values held by the community. During the last three decades the development of marine and fisheries has always been positioned as a peripheral sector in national economic development. Data discovery was made through a review of existing literature, especially peer-reviewed papers, articles and research reports, but also from government reports and assessments and other literature on coastal communities in Indonesia. This data is used

Info Artikel

Riwayat Artikel:

Diterima 09 November 2022

Direvisi 15 November 2022

Revisi diterima 21 November 2022

Kata Kunci:

Kesejahteraan Masyarakat, Masyarakat Pesisir, Pemberdayaan Usaha Lokal.

Keywords:

Coastal Communities, Community Welfare, Local Business Empowerment.

Penulis Koresponden:

Pijar Hatinurani Merdeka
Universitas Padjadjaran
Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Pijar2000@gmail.com

to analyze solutions to improve the welfare of coastal communities that are effective. Coastal community empowerment programs can be carried out in various ways depending on the aspects to be improved. However, of the several programs implemented, one of them focused on increasing the mindset in viewing potential resources, one of which was seminar activities in resource management.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



How to Cite: Merdeka, Pijar Hatinurani. (2023). Manajemen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Melalui Pemberdayaan Usaha Lokal Masyarakat: *a Review. Journal of Accounting, Management, Economics, and Business (ANALYSIS)*, 1(1) 1-9. DOI: <https://doi.org/10.56855/analysis.v1i1.180>

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara maritim yang mempunyai luas laut sekitar 70% dari total luas wilayah Indonesia. Potensi sumberdaya alam yang melimpah semakin menambah keyakinan bahwa negara ini adalah negara maritim. Di balik nama besar itu, masih banyak penduduk yang tidak atau bahkan belum merasakan udara pembangunan yang telah lama digalakkan di negara ini. Masyarakat pesisirnya kebanyakan masih hidup dalam kemiskinan. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat pesisir, salah satunya melalui hukum atau kebijakan pemerintah yang mempertimbangkan budaya dan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Selama tiga dasawarsa terakhir pembangunan kelautan dan perikanan selalu diposisikan sebagai sektor yang dipinggirkan (peripheral sector) dalam pembangunan ekonomi nasional. Hal ini berarti bahwa bidang kelautan yang didefinisikan sebagai sektor perikanan, pariwisata bahari, pertambangan laut, industri maritim dan jasa-jasa kelautan, bukan merupakan tujuan utama (main stream) kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Kondisi ini sangat ironis, mengingat bahwa hampir 70% wilayah Indonesia merupakan lautan dengan potensi ekonomis yang sangat tinggi. Luas perairan laut Indonesia diperkirakan mencapai 5,8 juta km² yang terdiri atas 0,3 juta km² laut territorial, 2,8 juta km perairan nusantara dan 2,7 juta km perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Sehingga secara ekonomis sangat logis bila pada masa yang akan datang pembangunan nasional diarahkan pada bidang kelautan dan perikanan. Wilayah pesisir dan laut merupakan sebuah kawasan dinamis yang strategis untuk pengembangan berbagai sektor usaha. Berkembangnya sejumlah sektor usaha, dengan sejumlah stakeholder dalam pembangunan wilayah pesisir dan laut, tanpa adanya keterpaduan dalam pengembangannya justru akan menciptakan konflik-konflik baru. Untuk memecahkan permasalahan konflik antar kepentingan dalam pembangunan kawasan pesisir dan laut, The World Commission on Environment and Development (WCED) pada tahun 1987 memberikan batasan dalam pembangunan suatu kawasan, termasuk pesisir dan laut. Batasan tersebut meliputi 3 dimensi utama, yaitu dimensi ekonomi (efisien serta layak), sosial (berkeadilan) dan ekologis (ramah lingkungan). Masyarakat pesisir identik dengan individu yang hidup di areal sekitar pantai yang terkadang terlupakan

oleh pembangunan sebab kebijakan pemerintah yang hanya terfokus pada pembangunan wilayah pesisir. Hal ini juga didukung oleh bahwa kehidupan nelayan masih menggantungkan nasib kepada hasil laut, yang semakin sulit sebagai sarana para nelayan memperbaiki kualitas hidupnya. Di sisi lain hasil tangkapan yang merupakan sumber utama dijual bukan kepada konsumen langsung tapi kepada tengkulak atau kepada nelayan lain yang kondisi ekonominya lebih baik (bakul ikan atau pedagang ikan), yang mempunyai 2 fungsi yaitu sebagai pedagang ikan dan rentenir. Nelayan harus menjual ikannya dengan harga yang sangat murah sebagai kompensasi pinjaman yang telah diberikan. Kondisi ini yang menjerat leher nelayan, yang mau tidak mau harus dijalani demi kehidupan dan di sisi lain mereka harus membayar bunga yang cukup tinggi. Apabila generasi baru nelayan dilahirkan kembali, tentu generasi ini memilih untuk tidak berayah bunda nelayan. Kondisi komunitas nelayan dari dulu hingga sekarang status ekonominya lebih terpuruk dibandingkan profesi lainnya. Kesejahteraan para nelayan semakin tahun semakin memprihatinkan karena semakin berkurangnya target fishing bahkan sudah sampai pada titik over fishing, selain itu semakin menyempitnya fishing ground, dan kebutuhan hidup yang semakin membumbung tinggi, ditambah lagi lingkungan perairan serta ekosistem nya rusak baik ulah manusia maupun bencana alam (Indarti & Wardana, 2013; Probosiwi, 2013).

Manajemen mempunyai berbagai arti, pertama sebagai pengelolaan, pengendalian, atau penanganan (Managing) kedua perlakuan secara terampil untuk menangani sesuatu berupa Skillful treatment. Ketika, gabungan dari dua pengertian tersebut, yaitu yang berhubungan dengan pengelolaan suatu perusahaan, rumah tangga atau suatu bentuk kerja sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Masyarakat pesisir yang terdiri dari nelayan, pembudidaya ikan, pembudidaya rumput laut, pengolah dan pedagang hasil laut, serta masyarakat lainnya dimana kehidupan sosial ekonominya tergantung pada sumberdaya laut merupakan segmen anak bangsa yang umumnya masih tergolong miskin. Kesejahteraan masyarakat pesisir memerlukan program terobosan baru yang dapat meningkatkan akses terhadap modal, manajemen dan teknologi serta dapat mentransformasikan struktur dan kultur masyarakat pesisir dan nelayan secara berkelanjutan. Terobosan yang dimaksud yakni pemberdayaan bagi masyarakat pesisir yang ada di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberdayaan atau empowerment merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan dan pemikiran serta kecenderungan. Kecenderungan primer merupakan pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Sedangkan, kecenderungan sekunder merupakan pemberdayaan yang menekankan pada proses stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan mereka (Lilik Rahmawati et al., 2017).

METODOLOGI

Penemuan data dilakukan melalui tinjauan literatur yang ada, terutama makalah peer-review, artikel dan laporan penelitian, tetapi juga dari laporan dan penilaian

pemerintah dan literatur lain tentang masyarakat pesisir di Indonesia. Data ini digunakan untuk menganalisis solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kehidupan Masyarakat Pesisir

Masyarakat pesisir sering dinilai sebagai masyarakat yang memiliki pola hidup yang kurang baik. Kondisi lingkungan dan karakteristik masyarakat dinilai mempengaruhi pola hidup masyarakat pesisir dari satu generasi ke generasi berikutnya. Penelitian ini menelaah pola hidup masyarakat pesisir yang terkait dengan ikatan sosial, lapangan kerja dan kesempatan berusaha, interaksi sosial budaya antara anggota keluarga dan warga masyarakat nelayan. Pola hidup nelayan, yaitu interaksi sosial dan budaya masyarakat nelayan Kabupaten Pasuruan masih kuat, sementara tingkat pendapatan dan kesempatan berusaha masih rendah. Metode pelatihan dan pengembangan diversifikasi usaha produk perikanan dapat meningkatkan pendapatan ekonomi nelayan. Nelayan sangat sulit untuk mendapatkan modal, karena sifat bisnis perikanan yang musiman, ketidakpastian serta resiko tinggi seringkali menjadi alasan dari pihak pemilik modal.

Ditambah lagi status pendidikan nelayan yang umumnya rendah membuat sulit untuk memenuhi persyaratan perolehan modal, misalnya collateral, insurance dan equity. Sebagian besar nelayan tidak memiliki kemampuan dalam mengakses permodalan. Nelayan sering terjebak berhutang pada rentenir dengan bunga tinggi. Modal usaha nelayan yaitu aset yang dimiliki nelayan dan peluang pengembangannya, manajemen modal usaha nelayan serta pengembangan modal usaha belum memberikan pengaruh terhadap peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat nelayan. Metode pelatihan dan pengembangan manajemen kewirausahaan ekonomi mikro dapat meningkatkan pendapatan ekonomi nelayan (La Suhu et al., 2020).

Sebagian besar nelayan tidak memahami mekanisme pengelolaan keuangan keluarganya. Rata-rata nelayan dan keluarganya tidak memiliki tabungan dan tidak tahu cara menabung di lembaga keuangan bank.



Gambar 1. Aktivitas nelayan (sumber: Costantein, et al., 2012)

Dari hasil penelitian tentang kehidupan nelayan, hasil survey analisis kebutuhan nelayan terdapat 90% nelayan sampel penelitian menginginkan adanya pendidikan dan pelatihan pengolahan produk olahan ikan. Pelatihan teknis wirausaha yang dibutuhkan adalah pengolahan ikan menjadi beberapa produk turunan seperti surimi ikan, bakso ikan, nugget ikan, sambal ikan. pelatihan teknis juga diarahkan pada bagaimana teknis pengemasan dan peningkatan kualitas produk olahan ikan menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Pelatihan lainnya yang dibutuhkan adalah pelatihan usaha pengelolaan ekowisata pesisir dan laut.

Konsep kebijakan pengembangan ekonomi produktif usaha pengolahan hasil perikanan yang berkelanjutan, dengan metode pelatihan dan pendampingan keluarga nelayan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Dalam penelitian lain menyebutkan bahwa Industri pengolahan ikan di wilayah pesisir masih terbatas produksinya untuk produk-produk sederhana saja seperti: ikan asin, ikan kering, petis dan terasi. Belum adanya investasi dalam bidang pengolahan ikan secara modern seperti industri pengalengan ikan, ikan beku atau industri kerupuk dan tepung ikan, membuat nelayan cenderung menjual ikan segar atau hasil olahan sederhananya saja (Indarti, 2015). Hal ini jelas berdampak pada penghasilan nelayan, karena produk-produk tradisional tersebut hanya memiliki nilai ekonomis yang rendah Nelayan sangat sulit untuk mendapatkan modal, karena sifat bisnis perikanan yang musiman, ketidakpastian serta resiko tinggi seringkali menjadi alasan dari pihak pemilik modal.

Ditambah lagi status pendidikan nelayan yang umumnya rendah membuat sulit untuk memenuhi persyaratan perolehan modal, misalnya collateral, insurance dan equity. Masalah klasik inilah yang membuat kelompok nelayan sulit untuk mengembangkan usahanya masalah permodalan yang tidak mencukupi. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kredibilitas nelayan untuk mengakses modal di lembaga keuangan formal dan tidak berfungsinya Koperasi Nelayan untuk menjadi organisasi ekonomi nelayan.

Pasar adalah salah satu faktor terpenting dan akan menjadi kendala utama apabila pasar tidak berkembang, oleh sebab itu membuat akses pasar adalah salah satu cara mengembangkan usaha. Pada dasarnya yang dihadapi masyarakat adalah pasar yang tidak sempurna strukturnya, monopoli pada saat nelayan membeli faktor produksi dan monopsoni pada saat nelayan menjual produknya. Struktur pasar yang tidak menguntungkan petani ini karena informasi yang kurang mengenai harga, komoditas, kualitas, kuantitas serta kontinuitas produk.

Hal ini disebabkan umumnya nelayan menghasilkan hasil tangkapan yang serupa, akhirnya membuat kelebihan pemasokan dan kejatuhan harga. Penyebab utamanya adalah TPI yang diharapkan dapat menciptakan mekanisme pasar dengan sehat tidak berfungsi. Selain hal tersebut, terdapat resiko lain menjadi masyarakat pesisir, yaitu terhadap bencana alam seperti tsunami. Dalam penelitian terdahulu, terdapat fakta bahwa kebijakan rencana pemanfaatan ruang di Perkotaan Pacitan kaitannya dengan tingkat risiko tsunami, maka pemerintah belum terlalu memperhatikan aspek risiko kebencanaan. Terbukti dengan terdapat beberapa penggunaan lahan sebagai pemukiman padat penduduk yang ditempatkan pada wilayah

dengan tingkat risiko “sangat tinggi”. Informasi risiko tsunami belum digunakan dalam penataan ruang dengan munculnya kategori “tidak sesuai” terutama pada penggunaan lahan pemukiman. Pengelolaan risiko tsunami adalah tanggung jawab bersama baik itu oleh pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat. Pemahaman akan tanggung jawab masing-masing dan kesediaan untuk bekerjasama dan pelibatan semua aktor menjadi hal penting untuk benar-benar dilakukan (Nugroho, 2015).

Potensi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Program pemberdayaan masyarakat pesisir bisa dilakukan dengan berbagai cara tergantung daripada aspek yang akan ditingkatkan. Namun dari beberapa program yang dilaksanakan salah satunya berfokus pada peningkatan mindset dalam melihat potensi sumberdaya, salah satunya adalah kegiatan seminar dalam pengolahan sumberdaya rumput laut, Rumput Laut dapat di olah menjadi macam-macam produk yang bernilai ekonomis tinggi, salah satunya yang sudah di praktekkan oleh masyarakat yakni Es Sarang Rumput Laut. Selain produk tersebut masih banyak yang dapat dikembangkan oleh masyarakat pesisir di Desa Langkomu seperti keripik rumput laut, kerupuk rumput laut, Brownies Rumput Laut dan sebagainya (Probosiwi, 2013).

Generasi muda masyarakat pesisir yang merupakan penerus harus ikut serta dalam pengelolaan, pemanfaatan serta penciptaan produk baru berbasis potensi lokal seperti Rumput Laut. Untuk mendukung hal tersebut maka kegiatan seperti ini hendaklah selalu dilakukan baik itu dalam bentuk seminar, pelatihan, penyuluhan, sosialisasi dan sebagainya, agar masyarakat mendapatkan penyegaran secara terus menerus. Penelitian lain menunjukan bahwa pola minat wisata para wisatawan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir. Sebuah metode yang diusulkan dengan nama marketing mix (7P) yang terdiri dari produk, harga, promosi, lokasi, proses, orang, dan bukti fisik secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat berkunjung kembali pada pantai Carocok Painan. Aspek penunjang juga ikut berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan, fasilitas penunjang yang tersedia di lokasi objek wisata Carocok Painan seperti lingkungan yang bersih dan nyaman, tersedianya mushola, toilet dan lahan parkir yang luas (Lilik Rahmawati et al., 2017; Sarapil & Wuaten, n.d.).

Selain datang dari wisata dan tourism spot, solusi pemberdayaan masyarakat pesisir juga datang dari bantuan langsung oleh pemerintah dalam pengadaan alat-alat maupun instrumen yang mampu menunjang mata pencaharian masyarakat pesisir, salah satunya adalah nelayan. Dalam penelitian terdahulu di Desa Maitara, Kabupaten Tidore terdapat program seperti:

- Program bantuan pengadaan ketinting bagi kelompok nelayan.
- Pengadaan fiberglass 3 GT bagi masyarakat nelayan
- Program pembangunan tempat pengasapan ikan di Desa Maitara
- Program pengadaan sarana perlengkapan pengasapan ikan.
- Program penyediaan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Pasar Perikanan Rum Rolibunga.

Program koperasi juga menjadi salah satu solusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Tugas pokok perusahaan koperasi adalah

menyelenggarakan pelayanan-pelayanan barang dan jasa yang menunjang perbaikan ekonomi rumah tangga anggota. Tugas koperasi untuk mempromosikan anggota perlu diformulasikan ke dalam ukuran-ukuran yang realistis dan operasional yang disebut sebagai cooperative effects. Tugas tersebut hanya dapat dilakukan apabila koperasi mampu bekerja dengan efisien. Nelayan memutuskan untuk bergabung dengan nelayan lain dan mendirikan koperasi didasarkan kepada keyakinan akan memperoleh manfaat ekonomis yang lebih besar dibanding dengan bekerja sendiri. Nelayan dalam kedudukannya sebagai anggota koperasi, berperan ganda yaitu sebagai pelanggan sekaligus pemilik koperasi. Nelayan sebagai pelanggan memperoleh manfaat harga koperasi sebagai hasil efisiensi dari pencapaian skala ekonomi melalui koperasi. Tetapi di dalam kedudukan nelayan sebagai pemilik koperasi, maka ia harus menanggung beban biaya organisasi koperasi. Skala kegiatan ekonomis tercapai melalui koperasi karena koperasi merupakan kerjasama kegiatan ekonomi yang sama dari seluruh anggota yang tergabung di dalamnya. Karena itu pembentukan suatu koperasi merupakan keputusan untuk membangun suatu aliansi strategis atau intercompany cooperation di antara nelayan guna mencapai keunggulan kompetitif (Mulyati & Afrinata, 2018; Nugroho, 2015).

Dalam solusi penanganan bencana alam seperti tsunami, dapat dibuat berdasarkan data kesiapan para warga atas datangnya tsunami. Kemudian hal tersebut dijadikan acuan dalam membuat strategi yang tepat untuk manajemen bencana. Seperti dalam penelitian sebelumnya di area Pacitan. Rencana penggunaan lahan di Perkotaan Pacitan, tentu tidak boleh bertentangan dengan pedoman dan strategi pengelolaan kawasan lindung dan budidaya. Terkait bencana ataupun secara ekonomi, kelangsungan kehidupan masyarakat, dan kelestarian lingkungan tetap harus diperhatikan. Rencana pemanfaatan pola ruang di Perkotaan Pacitan. secara umum pemanfaatan ruang di Perkotaan Pacitan masih rendah, hal ini dapat dilihat masih banyaknya lahan kosong. Pada perencanaan pemanfaatan ruang/ penggunaan lahannya, masih didominasi penggunaan lahan sebagai lahan cadangan dan kawasan budidaya (non-lindung).

Hal ini perlu perhatian khusus agar tidak terjadi penetrasi lingkungan ke kawasan lindung dengan pertimbangan bahwa kawasan lindung merupakan perlindungan bagi kawasan sumber/mata air di daerah sekitarnya. Perlu perhatian agar tidak terjadi perubahan guna lahan kawasan lindung untuk menjaga keberadaan kawasan lindung. Pada pembuatannya, RDTRK Pacitan tidak boleh menyimpang dari RTRW Kabupaten Pacitan. Berdasarkan rencana pemanfaatan lahannya terlihat bahwa RDTRK tetap mengacu pada ketentuan RTRW walaupun terdapat sedikit penyesuaian dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang telah ada dan memanfaatkan lahan tersebut. Pelaksanaan penataan ruang, Kabupaten Pacitan menerapkan kegiatan pengendalian, dan pengawasan pemanfaatan ruang untuk menertibkan tata ruang melalui penentuan zonasi, ketentuan perizinan, insentif-disinsentif, arahan sanksi, serta kegiatan penertiban. Kegiatan penertiban pernah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan kepada masyarakat yang bermukim di sepanjang Sungai Grindulu. Relokasi dilakukan untuk memindahkan penduduk yang sebelumnya berada sangat dekat dengan

sungai ke luar tanggul sungai sebagai upaya pengurangan risiko banjir di sepanjang Sungai Grindulu.

Di Perkotaan Pacitan, hampir seluruh wilayahnya merupakan wilayah rawan tsunami dengan tingkat kerawanan bervariasi antara kerawanan “sangat rendah” sampai dengan dominasi pada tingkat kerawanan “sangat tinggi”. Tata kelola pemerintahan (governance) yang dikembangkan pemerintah Pacitan dalam pengelolaan risiko bencananya, berhubungan dengan dimensi politis, dan administratif. Dimensi politis governance berhubungan dengan proses pembuatan keputusan dalam formulasi kebijakan termasuk perencanaan pengurangan bencana. Dimensi politis ini juga berhubungan dengan bagaimana pemerintah menjalin kerjasama dengan sektor swasta dan non-pemerintah untuk meningkatkan kualitas kebijakan yang dihasilkan. Sedangkan dimensi administratif berhubungan proses implementasi kebijakan dan kinerja organisasi baik di tingkat pusat maupun daerah. Kesesuaian penataan ruang dengan tingkat risiko tsunami penting dilakukan mengingat wilayah Pacitan merupakan wilayah rawan tsunami. Dengan intensitas penggunaan lahan yang terkonsentrasi pada pusat kota dengan dominasi pemukiman padat penduduk semakin membuat wilayah ini berisiko atas bencana tsunami. Kebutuhan lahan yang meningkat ternyata tidak berbanding lurus dengan potensi dan luas lahan (Probosiwi, 2013).

KESIMPULAN

Masyarakat pesisirnya kebanyakan masih hidup dalam kemiskinan. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat pesisir, salah satunya melalui hukum atau kebijakan pemerintah yang mempertimbangkan budaya dan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Pemberdayaan atau empowerment merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan dan pemikiran serta kecenderungan. Kecenderungan primer merupakan pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Program pemberdayaan masyarakat pesisir bisa dilakukan dengan berbagai cara tergantung daripada aspek yang akan ditingkatkan. Namun dari beberapa program yang dilaksanakan salah satunya berfokus pada peningkatan mindset dalam melihat potensi sumberdaya, salah satunya adalah kegiatan seminar dalam pengolahan sumberdaya rumput laut. Selain datang dari wisata dan tourism spot, solusi pemberdayaan masyarakat pesisir juga datang dari bantuan langsung oleh pemerintah dalam pengadaan alat-alat maupun instrumen yang mampu menunjang mata pencaharian masyarakat pesisir. Program koperasi juga menjadi salah satu solusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Tugas pokok perusahaan koperasi adalah menyelenggarakan pelayanan-pelayanan barang dan jasa yang menunjang perbaikan ekonomi rumah tangga anggota.

DAFTAR PUSTAKA

- Indarti, I. (2015). Model Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Berkelanjutan. *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1)(1), 63–75.
- Indarti, I., & Wardana, D. S. (2013). Implementation of Coastal Village Coaching Policy. *BENEFIT Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 17(1), 75–88.
- La Suhu, B., Rasid, P., & Kurniawan, M. (2020). Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan Di Wilayah Kota Tidore Kepulauan. *Jurnal Government of Archipelago*, 1.
- Lilik Rahmawati, Ummiy Fauziyah Laili, & Fatikul Himami. (2017). Pemberdayaan Ekonomi Transformatif: Pendampingan Manajemen Bisnis pada Jamaah Musholla Putri Manbaul Falah Desa Manyarsidorukun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. *Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 149–169. <https://doi.org/10.29062/engagement.v1i2.12>
- Mulyati, Y., & Afrinata, M. (2018). Analisis Pengaruh Strategi Bauran Pemasaran Terhadap Minat Berkunjung Kembali Pada Destinasi Wisata Pantai Carocok Painan Kabupaten Pesisir Selatan (Studi Kasus Pada Wisatawan Domestik). *JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI Dan MANAJEMEN BISNIS*, 6(2), 191–200. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v6i2.1014>
- Nugroho, M. (2015). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI KABUPATEN PASURUAN : KAJIAN PENGEMBANGAN MODEL PEMBERDAYAAN Abstrak PENDAHULUAN Pengembangan sumberdaya manusia yang paling berpengaruh adalah pendidikan , menurut Ginting (2006) pendidikan adalah sangat berhubungan de. *Jurnal Teknologi Pangan*, 6(1). <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/Teknologi-Pangan/article/view/464/361>
- Probosiwi, R. (2013). Manajemen Risiko Tsunami Untuk Penataan Ruang Di Pesisir Perkotaan Pacitan Jawa Timur. *Jurnal Teknosains*, 2(2), 121–134. <https://doi.org/10.22146/teknosains.6002>
- Sarapil, C. I., & Wuaten, J. F. (n.d.). (*Thunnus Albacores*) Studi Kasus di Pesisir Pantai Akembuala Kelurahan Santiago Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe (*Household Management of Tuna Catchers (Thunnus Albacores) Case Study at Akembuala Coastal Coast of Santiago Sub-District Tahu*. 23–30.